

Sumber : <i>KOMPAS</i>	Hari/Tgl : <i>Selasa, 15 Feb 2022</i>	Hlm/Kol : <i>6/2-6</i>
Subjek : <i>PENDIDIKAN - KURIKULUM</i>	Bidang : <i>140/Com</i> <i>Pada umumnya</i>	

Inovasi Kurikulum Merdeka

Anita Lie

Guru Besar FKIP Unika Widya Mandala, Surabaya

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan Kurikulum Prototipe sebagai Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Belajar. Peluncuran pada 11 Februari 2022 dalam Agenda Merdeka Belajar Episode 15 itu dilakukan setelah melalui serangkaian kegiatan uji publik dan sosialisasi.

Tiga keunggulan yang dijanjikan dalam Kurikulum Merdeka. Pertama, fokus pada materi esensial agar ada penguasaan dan pengembangan kompetensi yang lebih bermakna dan menyenangkan.

Kedua, kemerdekaan guru mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan pelajar dan wewenang sekolah mengembangkan dan mengelola kurikulum. Ketiga, pembelajaran melalui kegiatan proyek untuk pengembangan karakter dan kompetensi Profil Pelajar Pancasila melalui eksplorasi isu-isu aktual.

Apakah implementasi Kurikulum Merdeka akan bisa mengatasi krisis pembelajaran di Indonesia? Ada tiga faktor penting yang bisa mendorong keberhasilan Kurikulum Merdeka.

Guru dan kurikulum

Ada tiga model perubahan kurikulum menurut pakar kurikulum Allan Glatthorn (2015). Pertama, agenda pengembangan kapasitas guru mendahului dan menuju pada perubahan kurikulum. Kedua, pelatihan guru dilaksanakan untuk mendukung kurikulum yang baru dibuat. Ketiga, pembelajaran berbasis komunitas diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan kurikulum baru.

Tiga pilihan model ini tentu perlu disesuaikan dengan berbagai variabel di suatu negara, terutama variabel guru.

Kurikulum Merdeka ini diluncurkan hampir 20 bulan setelah Episode 5 Program Guru Penggerak diluncurkan 3 Juli 2020 dan setahun setelah Episode 7 Program Sekolah Penggerak 5 Februari 2021.

Dari enam angkatan Guru Penggerak yang diselenggarakan, ada sekitar 32.000 guru penggerak dan calon guru penggerak serta 9.272 sekolah penggerak. Ada pula alumni Program Profesi Guru Pra-Jabatan dan Dalam-Jabatan.

Melaksanakan model pertama secara tuntas tak mungkin karena menyelesaikan pengembangan kapasitas bagi sekitar 3,3 juta guru di Indonesia akan menunda proses perubahan kurikulum, padahal urgensi penggunaan kurikulum yang merdeka sudah amat kuat.

Memberikan kebebasan kepada sekolah untuk memilih antara Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat (masa pandemi), atau Kurikulum Merdeka merupakan strategi cerdas sesuai dengan kapasitas tiap-tiap sekolah. Pemberian pilihan ini juga sesuai dengan roh Gerakan Merdeka Belajar.

Secara ideal, pilihan yang tepat pada tingkat sekolah akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan menentukan keberhasilan pelaksanaan kurikulum.

Pada sisi lain, yang perlu diantisipasi adalah kebingungan sebagian pimpinan sekolah (terutama yang belum dapat kesempatan sebagai Sekolah Penggerak) untuk menentukan pilihan. Proses kemerdekaan secara masif membutuhkan waktu dan strategi. Selama ini

banyak aktor persekolahan sudah terperangkap dalam habitus petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sehingga kebebasan memilih justru bisa menakutkan.

Kebingungan kepala sekolah juga seiring dengan para guru yang harus merancang, mengelola, menyampaikan, dan menilai proses pembelajaran tanpa ketentuan berapa menit per jam pelajarannya dan bagaimana pembelajaran melalui kegiatan proyek bisa dilakukan.

Demikian pula dengan efisiensi materi dan fokus pada materi esensial yang akan membuat guru kompeten berprestasi karena bisa melakukan inovasi pembelajaran dengan bebas, tetapi sebaliknya akan membingungkan sebagian guru kurang terampil yang biasanya menggunakan keluasan cakupan materi sebagai alasan ketergantungan pada hanya satu metode pengajaran—ceramah.

Tentunya kebebasan ini perlu didukung dengan peningkatan keterampilan yang sudah dimiliki oleh sebagian guru, tetapi masih belum merata.

Kontekstualisasi

Otoritas pendidikan, terutama di tingkat daerah, diharapkan bisa bergerak tangkas dalam keterjebakan birokrasi serta mendukung sekolah dan aktor persekolahan untuk menggunakan kebebasan dalam pengelolaan kurikulum dengan tepat. Kepatuhan buta sebagian aktor persekolahan pada aparat dinas pendidikan dan yayasan penyelenggara akan jadi faktor penghambat jika aparat gagal memahami visi dan tujuan Kurikulum Merdeka.

Poin penting lain ialah ketegangan antara penyeragaman

dan keberagaman.

"Besarnya negara Indonesia dengan beragam konteks budaya dan lingkungan menjadi salah satu alasan utama pentingnya kontekstualisasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Dalam konteks yang sangat beragam ini, kurikulum yang ter-sentralisasi bukan hanya tidak efektif, melainkan juga secara alami tak dapat dilakukan" (Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran, 2022).

Gagasan kontekstualisasi kurikulum bagus untuk merawat kebermaknaan dan relevansi kurikulum untuk setiap daerah dan bahkan satuan pendidikan.

Namun, perlu ada kejernihan tentang kontekstualisasi ini. Pilihan materi esensial, strategi pembelajaran, termasuk metode dan media pembelajaran, serta perancangan proyek pembelajaran bisa disesuaikan dengan konteks tiap-tiap daerah. Namun, seyogianya ada standarisasi dan ekspektasi terhadap capaian pembelajaran.

Misalnya, seorang lulusan SMA/SMK diharapkan sudah bisa mengelola dirinya sendiri, mengembangkan potensi diri untuk mencapai tujuan hidupnya dengan melanjutkan studi atau mulai berkarier, berkontribusi kepada masyarakatnya melalui kompetensinya, dan memecahkan permasalahan di sekitar kehidupannya.

Memberi ruang kepada keberagaman tanpa ketegasan ekspektasi terhadap capaian pembelajaran akan membuat kesenjangan prestasi pelajar makin tajam. Anak-anak dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah kepala daerah yang kurang peduli akan makin terpinggirkan.

Lintas kementerian

Bersamaan dengan peluncuran Kurikulum Merdeka, Mendikbudristek juga meluncurkan platform Merdeka Mengajar. Inovasi ini perlu diapresiasi karena akan jadi sarana pendukung guru dalam pelaksanaan dan pengembangan Kurikulum Merdeka dan juga wahana guru saling berbagi dan belajar. Akselerasi para guru selama masa pembelajaran jarak jauh perlu dilanjutkan dengan perluasan ruang eksplorasi guru menembus batas kelas, sekolah, daerah, dan negara.

Yang perlu diantisipasi adalah pemerataan akses terhadap

sarana pendukung ini. Jangan sampai disparitas digital membuat sebagian pelajar Indonesia makin tertinggal. Yang punya peluang maju memang harus didukung untuk terus melaju. Namun, yang sedang tertinggal perlu dicarikan solusinya.

Menurut catatan Bank Dunia, 29 Juli 2021, akses internet desa dan kota Indonesia masih timpang. Pada 2019, hanya 36 persen masyarakat dewasa di perdesaan yang sudah menikmati internet, sementara di perkotaan 62 persen.

Klaim efektivitas penggunaan Kurikulum Darurat pada saat peluncuran Kurikulum Merdeka perlu lebih diperinci. Sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013 mengalami *learning loss* lima bulan, sedangkan sekolah yang menggunakan Kurikulum Darurat mengalami *learning loss* satu bulan.

Kesimpulan yang diambil adalah "materi terlalu padat sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik". Saya mendukung pernyataan tentang kepadatan materi, tetapi mempertanyakan kaitan antara kurikulum darurat dan *learning loss*. Bagaimana profil 31,5 persen sekolah yang menggunakan kurikulum darurat selama pandemi Covid-19?

Bagaimana mereka mengakses modul-modul Kurikulum Darurat dan sumber-sumber belajar lain untuk menyesuaikan kurikulum secara mandiri? Apakah kurikulum darurat ini merupakan faktor efektivitas pembelajaran selama pandemi atau sekadar variabel antara? Sekolah/guru yang bisa mengakses modul-modul Kurikulum Darurat dan sumber-sumber belajar lain di internet adalah sekolah yang memang punya sarana prasarana memadai.

Kurikulum Merdeka ini perlu didukung, tetapi jangan sampai ada pengabaian terhadap anak-anak dari kalangan MBR dan sekolah-sekolah di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal). Faktor penting dalam keberhasilan Kurikulum Merdeka adalah strategi dan aksi nyata yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian. Infrastruktur jaringan telekomunikasi menjadi prasyarat terwujudnya "Pulih Bersama dan Pulih Lebih Kuat".